

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018.

Capaian kinerja Badan PPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK Badan PPSDMP tahun 2018. Rincian hasil capaian kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018 pada tabel 3.

Tabel 3
Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya penerapan pengelolaan pertanian terpadu dipedesaan	1 Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	10	10.56	105.60	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani nasional	2 Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	27.5	27.50	100	Berhasil
		3 Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	2.3	2.25	97.83	Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas layanan publik BPPSDMP	4 Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)	3.32	3.36	101.20	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian	5 Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan (%)	90	80.04	88.93	Berhasil

		6 Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan (%)	22	20.20	108.91	Sangat Berhasil
5.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian	7 Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)	82	83.29	101.57	Sangat Berhasil
		8 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) (Nilai)	86.25	87.00	100.87	Sangat Berhasil

Sumber data. Pusat dan Sekretariat Badan, tahun 2018

1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP tahun 2018

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kepentingan yang sama, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota yang dinamakan dengan kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan kelembagaan petani lainnya. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk mengubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usahatani sehingga mampu mengembangkan agribisnis dan menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri.

Pencapaian indikator kinerja ini diukur melalui perbandingan kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Kelembagaan petani yang telah menerapkan sistem pertanian terpadu}}{\sum \text{total kelembagaan petani di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

\sum kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu diperoleh dari jumlah kelompok tani (poktan) yang telah mengikuti kegiatan penumbuhan dan perkembangan penyuluh swadaya, Sekolah Lapangan (SL), dan menerapkan adaptasi teknologi spesifik lokalita.

\sum total kelembagaan petani merupakan jumlah poktan nasional yang terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional =

$$x = \frac{59.179}{565.727} \times 100\%$$

Secara rinci jumlah poktan yang menerapkan sistem pertanian terpadu terlihat pada tabel 4.

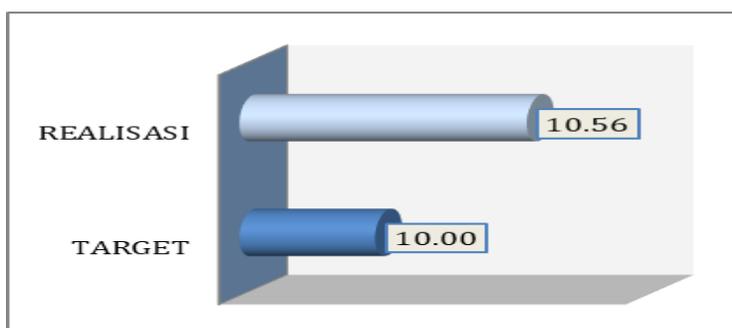
Tabel 4
Rincian Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu
Tahun 2018

Uraian	Tahun 2018
Jumlah Poktan yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu (poktan)	59,719
a. jumlah poktan yang mengikuti kegiatan penumbuhan dan perkembangan penyuluh swadaya	47,247
b. jumlah poktan yang mengikuti kegiatan SL	10,800
c. jumlah poktan yang mengikuti kegiatan adaptasi teknologi spesifik lokalita.	1,672
Jumlah Poktan Nasional (berdasarkan SIMLUHTAN) (poktan)	565,727
Rasio (%)	10.56

Sumber: Pusat Penyuluhan, tahun 2018

Capaian Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional sebesar 10,56% bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 10% maka tercapai 105,60% atau sangat berhasil.

Perbandingan persentase target dan realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2018 adalah pada gambar 5.



Gambar 5. Target dan realisasi Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018



Gambar 6. Upaya percepatan tanam padi bagi petani (Teknik Tabur) di Kecamatan Muara Telang Banyuasin Sumatera Selatan, tahun 2018

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional

Pencapaian indikator kinerja ini diukur melalui perbandingan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional atau dengan rumus:

$$\left(\frac{\sum \text{Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya}}{\sum \text{total kelembagaan petani di Indonesia}} \right) \times 100\%$$

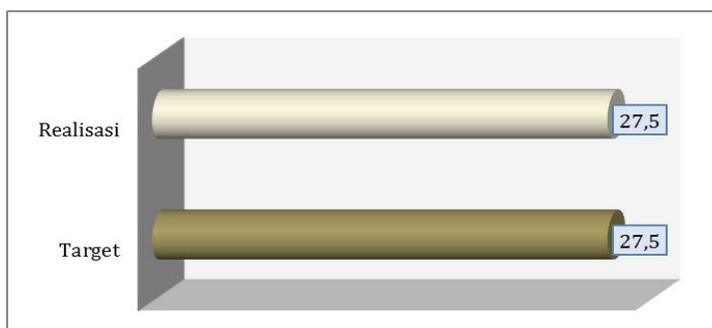
\sum kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya berasal dari jumlah Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP, masing-masing penyuluh baik Penyuluh Pertanian PNS dan THL-TBPP diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas sebanyak 5 (lima) poktan di wilayah kerjanya.

\sum total kelembagaan petani merupakan jumlah poktan nasional yang terdaftar dalam SIMLUHTAN.

Berdasarkan rumus perhitungan tersebut maka capaian indikator Rasio Kelembagaan Petani yang Menerapkan Sistem Pertanian Terpadu Terhadap Total Kelembagaan Petani Nasional :

$$x = 155.575/565.727 \times 100\% = 27,5 \%$$

Perbandingan persentase target dan realisasi rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2018 adalah pada gambar 7.



Gambar 7. Target dan realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional 2018

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional

Pencapaian kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional dengan target 2,3% (287 unit) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Target} &= \text{Total KEP (ditahun 2017)} \times \text{Target PK} \\ &= 12.468 \times 2,3\% = \mathbf{287 \text{ KEP}} \end{aligned}$$

Keterangan :

1. Total jumlah KEP di tahun 2017 = 12.468
2. Target PK tahun 2018 = 2,3%

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &: = \text{Total KEP (ditahun 2018)} / \text{Total Poktan Nasional} \times 100 \\ &= 12.755 / 565.727 \times 100 = \mathbf{2,25\%} \end{aligned}$$

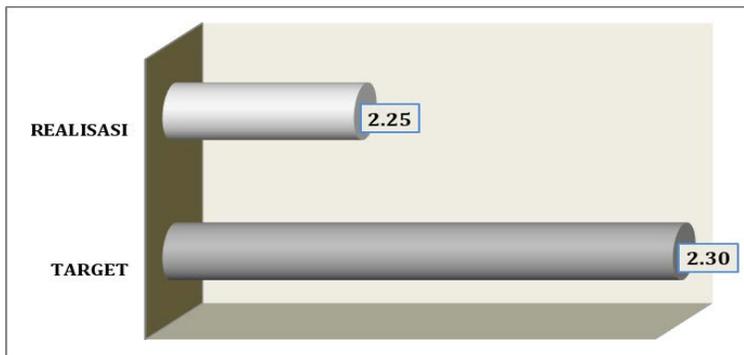
Keterangan :

1. Total jumlah KEP di tahun 2018 = 12.755
2. Total Poktan Nasional = 565.727

Persentase capaian kinerja yaitu :

$$\text{Realisasi/Target} \times 100 = 2,25 / 2,3 \times 100 = \mathbf{97,83\%}$$

Perbandingan persentase dari target dan realisasi rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional pada tahun 2018 adalah pada gambar 8.



Gambar 8. Target dan realisasi rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional, Tahun 2018

d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik Badan PPSDMP

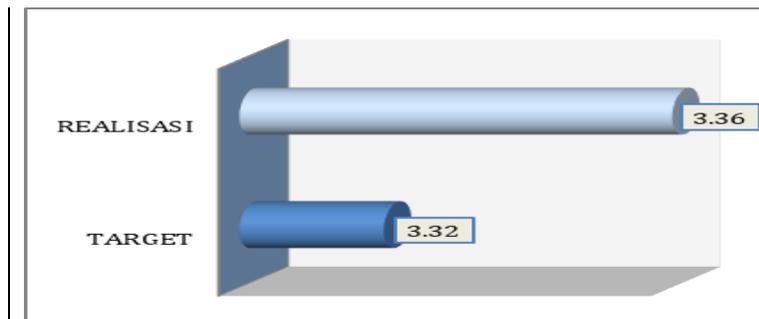
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BPPSDMP dengan target **3,32 Skala Likert** adalah Hasil penilaian IKM dari pengguna.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil survei kepuasan masyarakat dari seluruh unit kerja pelayanan publik pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) lingkup BPPSDMP. Realisasi dan pengukuran IKM adalah sebagai berikut

$$= \frac{\Sigma \text{Nilai IKM dari semua unit kerja pelayanan publik}}{\Sigma \text{Unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik}}$$

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP pada tahun 2018 adalah **3,36 Skala Likert**. Capaian persentase dari indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP adalah **101.20%**.

Perbandingan persentase dari target dan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik Badan PPSDMP pada tahun 2018 adalah pada gambar 9.



Gambar 9. Target dan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik Badan PPSDMP, Tahun 2018

- e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan

Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan dengan

target 90% adalah Lulusan Pendidikan tinggi dan menengah pertanian yang bekerja dibidang pertanian/melanjutkan study dibidang pertanian (data lulusan UPT).

Realisasi Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan adalah **80.04%**.

Pengukuran Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan adalah :

$$= \frac{\Sigma \text{Lulusan pendidikan bekerja dibidang pertanian}}{\Sigma \text{Lulusan pendidikan pertanian}} \times 100$$

$$= 742/927 \times 100 = \mathbf{80.04\%}$$

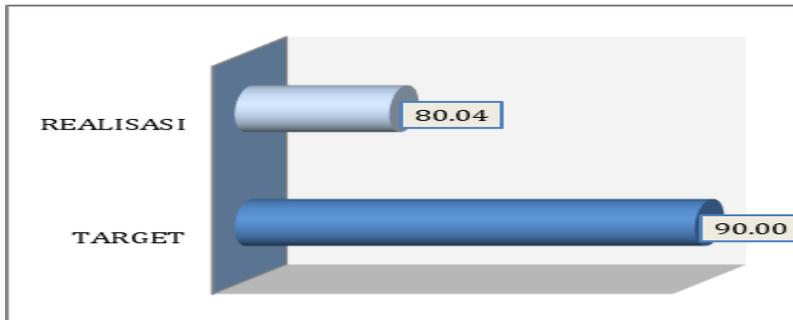
Keterangan :

1. Jumlah Lulusan Pendidikan Pertanian = 927 orang
2. Jumlah Lulusan yang brekerja dibidang Pertanian = 742 orang

Realisasi kinerja Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan pada tahun 2018 adalah 80.04%, sehingga persentase capaian kinerja adalah :

$$\text{Persentase Capaian} = \text{Realisasi}/\text{Target} \times 100 = 80.04/90 \times 100 = \mathbf{88.93\%}$$

Perbandingan persentase dari target dan realisasi Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan pada tahun 2018 adalah pada gambar 10.



Gambar 10. Target dan Realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2018



Gambar 11. Kerjasama Polbangtan Manokwari Dengan 6 Perusahaan di Bidang Pangan PT. sayuran siap saji, PT. Medion Farma Jaya, PT. Salsabila Nuresery, PT. Taman Bunga Nusantara, PT. Estetika Kata Tiara dan PT. Cheil Jedang, tahun 2019

- f. Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan
- Sasaran program meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan pembangunan pertanian dengan indikator kinerja penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan dengan **target 22%**. Realisasi Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan tahun 2018 berdasarkan indikator CGI peserta pelatihan dari masing-masing UPT Lingkup Badan PPSDMP pada tabel 5.

Tabel 5
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja UPT berdasarkan Indikator CGI peserta pelatihan diperoleh dari rata-rata hasil CGI tahun 2018

NO	NAMA UPT	RATA-RATA
1	PPMKP Ciawi	20.37
2	BBPP Lembang	18.81
3	BBPKH Cinagara	21.30
4	BBPP Batu	20.62
5	BBPP Ketindan	21.98
6	BBPP Batangkaluku	19.25
7	BBPP Binuang	21.51
8	BBPP Kupang	22.84
9	BPP Jambi	14.02
10	BPP Lampung	21.32
	Rata-rata	20.20

Sumber data. Pusat Pelatihan, tahun 2018

Penurunan rata-rata competency gap index peserta pelatihan dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan kompetensi individu terhadap standar kompetensi yang dipersyaratkan atas jabatan atau pekerjaan individu setelah mengikuti diklat atau pelatihan. Kompetensi SDM adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Untuk **Formula CGI = Standar Kompetensi Kerja (SKK) - rata-rata nilai kompetensi (70% x nilai pengetahuan dan keterampilan + 30% x nilai sikap dan perilaku)**. Penjelasan rumus formula CGI yaitu:

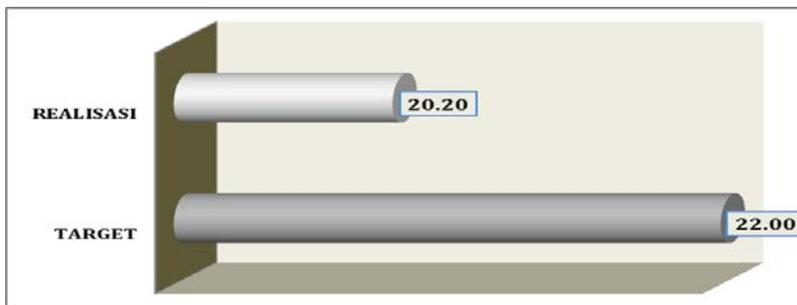
1. Nilai Standar Kompetensi Kerja (SKK) menggunakan bobot 70 – 100% disesuaikan dengan bobot jenis pelatihan
2. Nilai Kompetensi diperoleh dari hasil evaluasi pada saat pelaksanaan pelatihan dengan nilai rata-rata 70% dikali nilai pengetahuan dan

keterampilan (nilai peningkatan pengetahuan dan keterampilan yaitu nilai rata-rata (kemajuan berlatih + penguasaan materi (LP6)) ditambah nilai rata-rata 30% dikali nilai aspek sikap dan perilaku (LP7) diperoleh dari penilaian sikap dan perilaku

Realisasi kinerja Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan pada tahun 2018 adalah 20,20% (**sangat berhasil**), sehingga persentase capaian kinerja adalah :

$$= \text{Target/Realisasi} \times 100 = 22.00/20.20 \times 100 = \mathbf{108.91\%}$$

Perbandingan realisasi dan target dari Penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) peserta pelatihan pada tahun 2018 adalah pada gambar 12.



Gambar 12. Target dan realisasi penurunan rata-rata Competency Gap Index (CGI) Peserta Pelatihan tahun 2018

- g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Pengukuran Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan **target nilai 82** adalah hasil Evaluasi SAKIP Badan PPSDMP oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Realisasi kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2018 adalah

nilai **83,29**. Rincian hasil penilaian Inspektorat Jenderal terhadap SAKIP Badan PPSDMP tahun 2018 pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018

No	Akuntabilitas	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	27,06
2	Pengukuran Kinerja	20,83
3	Pelaporan Kinerja	12,28
4	Evaluasi Kinerja	7,29
5	Capaian Kinerja	15,83
Nilai Hasil Evaluasi		83,29
Kategori		Memuaskan

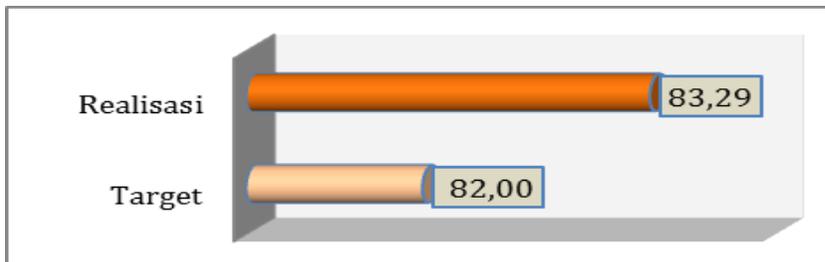
Sumber data. Inspektorat Jenderal, 2018

Keterangan kategori penilaian akuntabilitas kinerja dari Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut : AA => 90–100 (**Sangat Memuaskan**); A => 80–90 (**Memuaskan**, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel); BB => 70–80 (**Sangat Baik**); B => 60–70 **Baik**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan; CC => 50–60 (**Cukup (memadai)**, Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.); C => 30–50 (**Kurang**, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.); D = 0–30 (**Sangat Kurang**, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar).



Gambar 13. Apresiasi SAKIP Lingkup Badan PPSDMP tahun 2018

Persentase target dan realisasi dari Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2018 adalah pada gambar 14.

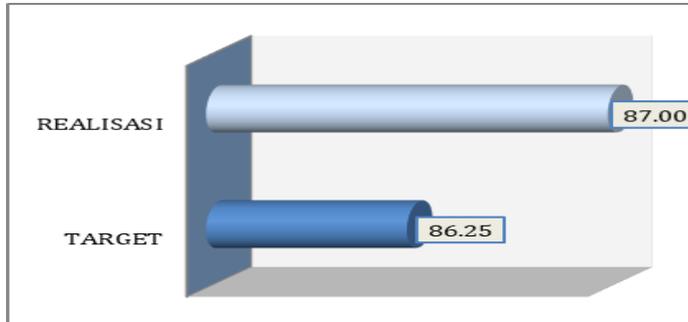


Gambar 14. Persentase target dan realisasi nilai AKIP Badan PPSDMP Tahun 2018

h. Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017

Realisasi nilai indikator kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017 adalah 87,00 (100.87%). Target indikator kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017 adalah 86,25. Persentase target dan realisasi dari Nilai

Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 pada tahun 2018 adalah pada gambar 15.



Gambar 15. Persentase Target dan Realisasi Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017 Badan PPSDMP tahun 2018

2. Perbandingan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2016 - 2018

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional

Realisasi pencapaian kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 10.56% (sangat berhasil) dari target 10%. Target dan realisasi Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional selama 3(tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 7.

Tabel 7
Target dan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2016-2018

No	Tahun	Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	
		Target	Realisasi
1	2016	-	-
2	2017	-	-
3	2018	10	10.56

Sumber. Pusat Penyuluhan, tahun 2018

Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional baru ditargetkan di tahun 2018.

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional

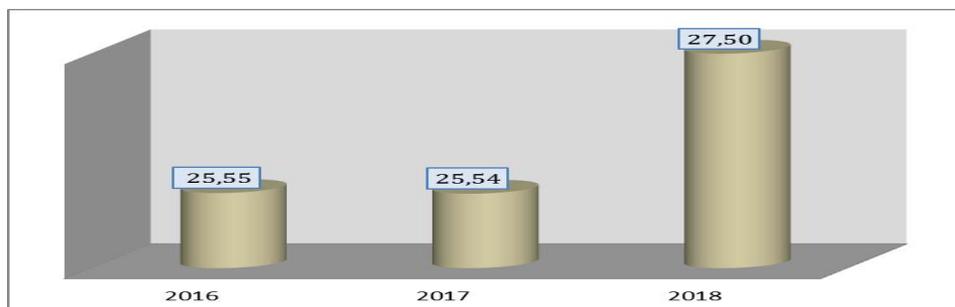
Realisasi pencapaian kinerja Rasio kelembagaan petani kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 27.5% (berhasil) dari target 27.5%. Target dan realisasi Rasio kelembagaan petani kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional selama 3(tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 8.

Tabel 8
Target dan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2016-2018

No	Tahun	Rasio kelembagaan petani kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	
		Target	Realisasi
1	2016	22.00	25.55
2	2017	25.00	25.54
3	2018	27.50	27.50

Sumber data. Pusat Penyuluhan, tahun 2018

Realisasi Rasio kelembagaan petani kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2016-2018 pada gambar 16.



Gambar 16. Realisasi capaian rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2016-2018

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional

Realisasi pencapaian kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 2.25% (berhasil) dari target 2.30%. Target dan realisasi kelembagaan petani

yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional selama 3(tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 9.

Tabel 9
Target dan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2016-2018

No	Tahun	Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional (%)	
		Target	Realisasi
1	2016	-	-
2	2017	-	-
3	2018	2.30	2.25

Sumber data. Pusat Penyuluhan, tahun 2018

Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional baru dinilai ditahun 2018.

- d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)

Realisasi pencapaian kinerja penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik BPPSDMP tahun 2018, adalah nilai 3,36 Skala Likert (Kategori Baik). Penilaian tersebut dilakukan oleh para *stakeholders* yang berhubungan langsung dengan unit kerja layanan masyarakat yang di 19 Unit Pelayanan teknis lingkup BPPSDMP. Berdasarkan Rencana Strategis BPPSDMP, Indikator Kinerja Sasaran Program IKM atas layanan publik BPPSDMP (skala likert) baru diterapkan pada tahun 2018 dengan target nilai 3,32 Skala Likert.

Target dan realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) selama 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 10.

Tabel 10
Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP tahun 2016-2018

No	Tahun	Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)	
		Target	Realisasi
1	2016	-	-
2	2017	-	-
3	2018	3.32	3.36

Sumber data. Sekretariat Badan PPSDMP, tahun 2018

Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Publik BPPSDMP baru dinilai ditahun 2018.

- e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan

Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan baru ditargetkan pada tahun 2018. Realisasi capaian untuk Indikator kinerja tahun 2018 mencapai 80.04% pada tabel 11.

Tabel 11

Target dan realisasi Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan, tahun 2016 - 2018

No	Tahun	Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan (%)	
		Target	Realisasi
1	2016	-	-
2	2017	-	-
3	2018	90	80.04

Sumber data. Pusat Pendidikan, tahun 2018

Capaian kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2019 harus mencapai target yaitu 90%.

f. Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan

Realisasi pencapaian kinerja Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 20.20% (berhasil) dari target 22%. Target dan realisasi Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan selama 3(tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 12.

Tabel 12
Target dan Realisasi Penurunan rata-rata competency gap index (CGI)
peserta pelatihan tahun 2016-2018

No	Tahun	Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan (%)	
		Target	Realisasi
1	2016	-	-
2	2017	-	-
3	2018	22	20.20

Sumber data. Pusat Pelatihan, tahun 2018

Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan baru ditargetkan tahun 2018.

g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

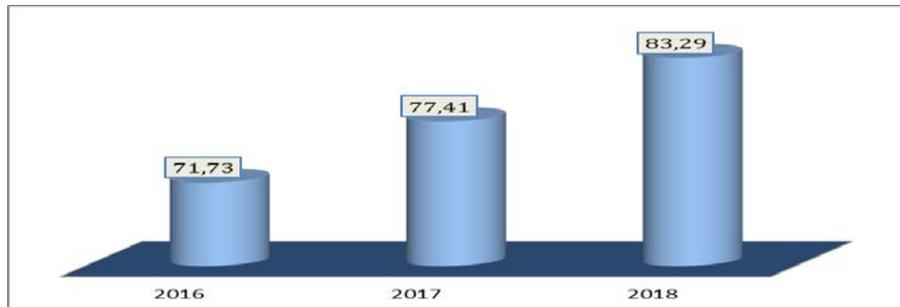
Realisasi pencapaian kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu nilai 83,29 (**sangat berhasil**) dari target nilai 82. Target dan realisasi Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama 3(tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 13.

Tabel 13
Target dan Realisasi Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016-2018

No	Tahun	Nilai AKIP	
		Target	Realisasi
1	2016	-	71,73
2	2017	-	77,41
3	2018	82	83,29

Sumber. Sekretariat Badan, 2018

Realisasi Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016-2018 pada gambar 17.



Gambar 17. Realisasi capaian kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2016-2018

Penilaian evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal mengalami peningkatan di 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 71,73 (2016), 77,41 (2017) dan 83,29 (th 2018). Peningkatan nilai AKIP Badan PPSDMP disebabkan perbaikan komponen yang dinilai oleh Itjen ke arah lebih baik yaitu peningkatan pada komponen : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Sedangkan komponen Capaian kinerja nilainya tetap, dan komponen evaluasi kinerja/evaluasi internal nilainya naik di tahun 2016-2017 dan mengalami penurunan nilai ditahun 2018. Rincian penilaian evaluasi masing-masing komponen yang dinilai pada SAKIP Badan PPSDMP pada tabel 14.

Tabel 14
Hasil penilaian evaluasi SAKIP Badan PPSDMP oleh Inspektorat Jenderal tahun 2016-2018

No	Komponen Yg Dinilai	Bobot	Tahun		
			2016	2017	2018
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,14	24,61	27,06
2.	Pengukuran Kinerja	25	18,96	19,27	20,83
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,33	10,33	12,28
4.	Evaluasi Kinerja/Evaluasi Internal	10	5,88	7,38	7,29
5.	Capaian Kinerja	20	14,42	15,83	15,83
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,73	77,41	83,29
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	A
			Sangat Baik	Sangat Baik	Memuaskan

Sumber Data. Sekretariat Badan, tahun 2018

h. Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)

Target dan realisasi Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) selama 3(tiga) tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 pada tabel 15.

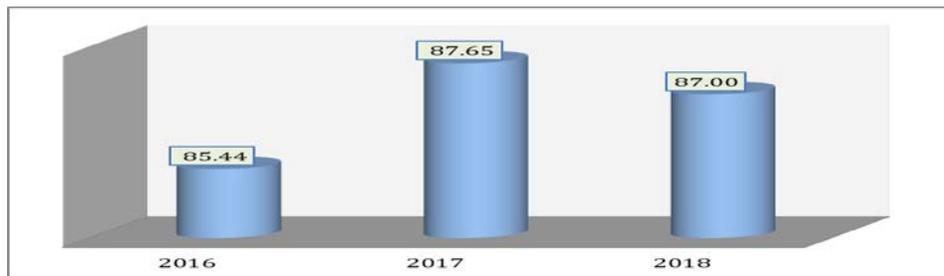
Tabel 15
Target dan realisasi Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017 tahun 2016 - 2018

No	Tahun	Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017	
		Target	Realisasi
1	2016	-	85,44
2	2017	-	87,65
3	2018	86,25	87,00

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2018

Tabel 15 menunjukkan bahwa tahun 2016-2017 Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) belum ditetapkan sebagai target, tetapi tahun 2016 sudah ada realisasi sebesar 85,44% dan tahun 2017

sebesar 87,65. Tahun 2018 nilai kinerja 87,00% dari target 86,25%. Realisasi Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017, selama tahun 2016-2018 pada gambar 18.



Gambar 18. Realisasi Capaian Kinerja Nilai Kinerja berdasarkan PMK 214 tahun 2017, tahun 2016-2018

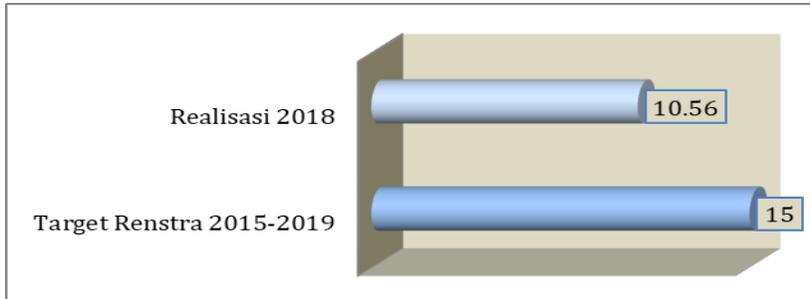
3. Perbandingan capaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2018, dengan target jangka menengah dalam Renstra (2015 sd 2019)

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional **tahun 2018 telah memenuhi target** yaitu 10.56% dengan persentase capaian 105% dari target 10%. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional adalah 15%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan

petani nasional tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 19.



Gambar 19. Perbandingan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 *dengan* Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

Gambar 19 menunjukkan bahwa realisasi rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 adalah 10,56%, berarti belum memenuhi target renstra Badan PPSDMP (2015-2019) sebesar 15%. Tahun 2019 rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional harus memenuhi target 15%.

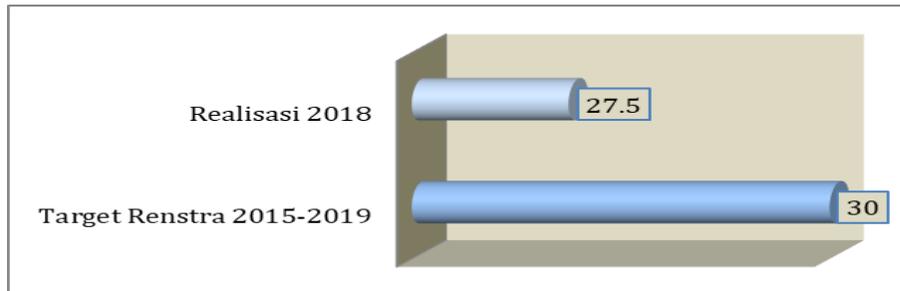


Gambar 20. Penyuluh pertanian mengawal, mendampingi dan menggerakkan petani dalam menerapkan teknologi yang direkomendasikan pada kegiatan UPSUS, tahun 2018.

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional **tahun 2018 telah memenuhi target** yaitu 27.5% dengan persentase capaian 100% dari target 27.5%. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional adalah 30%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 21.



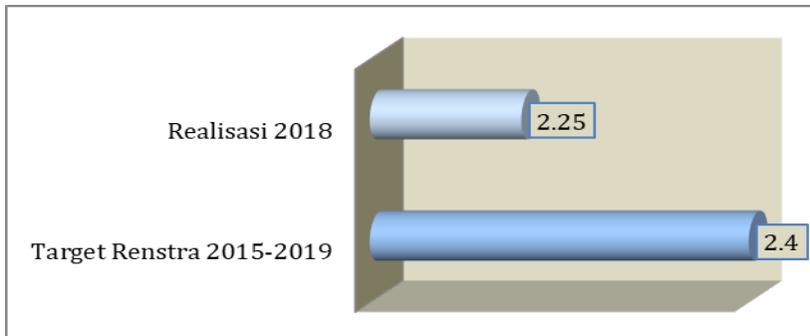
Gambar 21. Perbandingan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

Gambar 21 menunjukkan bahwa realisasi rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 adalah 27.50%, berarti belum memenuhi target renstra Badan PPSDMP (2015-2019) sebesar 30%. Tahun 2019 rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional harus memenuhi target sebesar 30%.

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional **tahun 2018 belum memenuhi target** yaitu 2.25% dari target 2.3%. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional adalah 2.4%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 22.



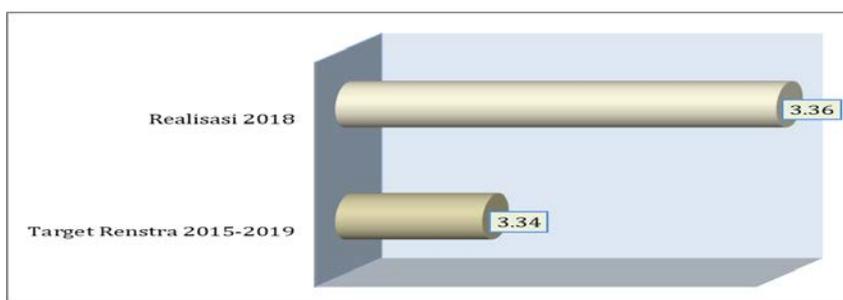
Gambar 22. Perbandingan Realisasi Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 *dengan* Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

Gambar 22 menunjukkan bahwa realisasi rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional tahun 2018 adalah 2.25%, berarti belum memenuhi target renstra Badan PPSDMP (2015-2019) sebesar 2.4%. Tahun 2019 Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional harus memenuhi target sebesar 2.4%

d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert)

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) penilaian para pengguna layanan di UPT lingkup BPPSDMP **tahun 2018 telah memenuhi target** yaitu 3,36 Skala Likert dengan persentase capaian 101,20% dari target 3,32 Skala Likert. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert), terdiri dari target tahun 2018 yaitu Nilai 3,32 dan target tahun 2019 yaitu nilai 3,34. Dikarenakan indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) baru dilaksanakan pada tahun 2018, maka belum bisa dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 23.



Gambar 23. Perbandingan Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert) tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

- e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan

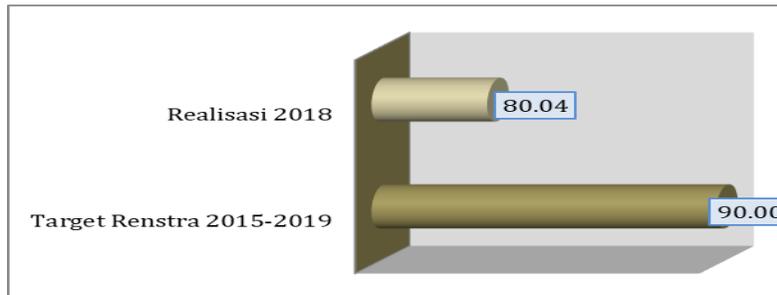
Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan **tahun 2018 belum memenuhi target** yaitu 80.04% dari target 90%.



Gambar 24. Kepala Badan PPSDMP dan siswa/i di Polbangtan Bogor Tahun 2018

Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun 2018 adalah 90% dengan rincian target : dari tahun 2015 sampai dengan 2017 belum ditentukan karena pada 3 (tiga) tahun tersebut indikatornya jumlah SDM lulusan pendidikan tinggi pertanian yang memenuhi standar kompetensi kerja.

Perbandingan Realisasi Kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 25.

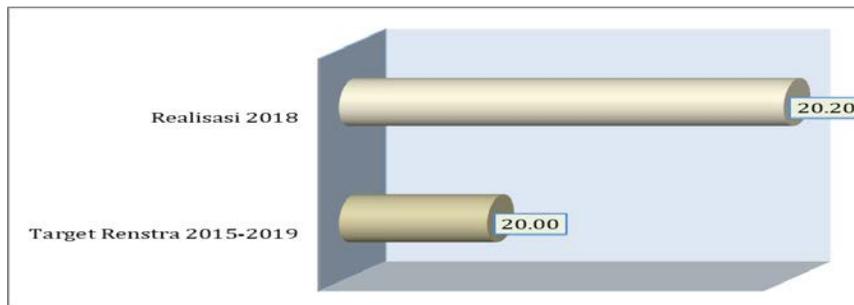


Gambar 25. Perbandingan Realisasi rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tahun 2018 *dengan* Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

- f. Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan.

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan **tahun 2018 telah memenuhi target** yaitu 20.20% dengan persentase capaian 108.91% dari target 22%. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan adalah 20%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 26.



Gambar 26. Perbandingan Realisasi Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2018 *dengan* Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

Gambar 26 menunjukkan bahwa realisasi Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2018 adalah 20.20%. Tahun 2019 Penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan tahun 2018 harus memenuhi target sebesar 20%.



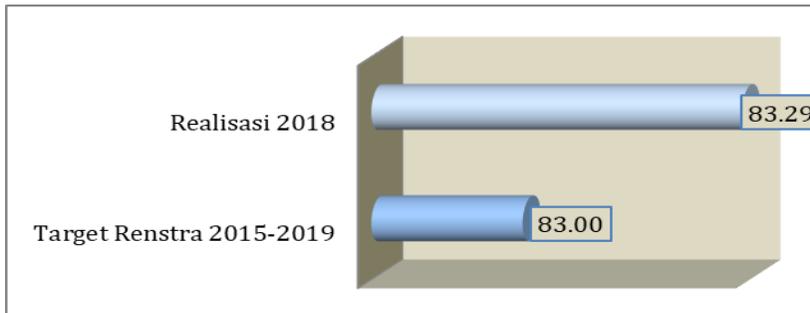
Gambar 27. Pelatihan (Tematik Peternakan dan Prajabatan CPNS) di UPT Pelatihan Badan PPSDMP Tahun 2018

- g. Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian **tahun 2018 telah memenuhi target** yaitu nilai 83.29 dengan persentase capaian 101.57% dari target nilai 82. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator

kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah nilai 83.

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 28.



Gambar 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Badan PPSDMP tahun 2018 *dengan* Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019)

Gambar 28 menunjukkan bahwa realisasi Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Badan PPSDMP tahun 2018 adalah nilai 83.29, berarti sudah melebihi target renstra Badan PPSDMP (2015-2019) nilai 83. Tahun 2019 Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Badan PPSDMP harus memenuhi target nilai 83.

h. Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)

Realisasi capaian untuk Indikator kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) **tahun 2018 telah memenuhi target** yaitu nilai

87.00 dengan persentase capaian 100.87% dari target nilai 86.25. Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) untuk Indikator kinerja Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) adalah nilai 86,50.

Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP (2015-2019) pada gambar 29.



Gambar 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017, tahun 2018 *dengan* Target Jangka Menengah dalam Renstra Badan PPSDMP tahun 2015-2019

Gambar 29 menunjukkan bahwa realisasi Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017, pada tahun 2018 adalah nilai 87.00, berarti sudah memenuhi target renstra Badan PPSDMP (2015-2019) yaitu nilai 86.50%. Tahun 2019 Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) harus memenuhi target nilai 86.50.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi.

- a. Rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional.

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Swadaya.

Penumbuhan dan pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi para petani ahli untuk memotivasi petani lainnya dalam menerapkan teknologi terutama untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis nasional.

Tujuan Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Swadaya adalah meningkatkan peran dan motivasi penyuluh pertanian swadaya dalam melakukan kegiatan pembelajaran sebagai mitra kerja Penyuluh Pertanian PNS dalam pendampingan kelompok tani, dan meningkatkan wawasan dan kemampuan penyuluh pertanian swadaya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan pertanian.

Strategi pelaksanaan penumbuhan dan pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya melalui peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian Swadaya yang difasilitasi dengan kegiatan demplot.

Adapun tahapan pelaksanaan Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya, yaitu : 1).Bahan Demplot, 2). Rembug Tani, 3). Kursus Tani *dan* 4).Bantuan Transport.

Kegiatan Penumbuhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Swadaya adalah kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu sebesar 90% dari total yang difasilitasi.

2. Sekolah Lapang.

Gerakan Pemberdayaan Petani Mendukung UPSUS dengan Metode SL adalah salah satu proses pembelajaran non formal bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam mengenali potensi, menyusun rencana usaha, identifikasi dan mengatasi permasalahan, mengambil keputusan serta menerapkan teknologi yang sesuai dengan sumberdaya setempat

secara sinergis dan berwawasan lingkungan sehingga usahatani lebih efisien, berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan. Sekolah Lapangan dapat dipandang sebagai salah satu metode dalam proses belajar mengajar yang cukup efektif, karena sangat cocok sebagai metode pembelajaran bagi orang dewasa (*Andragogi*) karena sifatnya tidak formal. Proses belajar dilakukan dilapangan dimana tersedia obyek nyata yang dijadikan materi pelajaran. Sekolah Lapangan ini dirancang untuk menjawab agar penerapan sistem pertanian terpadu dapat diwujudkan.

Tujuan SL adalah : 1). Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha tani; 2). Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani dalam memanfaatkan lahan usaha taninya agar lebih produktif; 3). Menggerakkan dan memberdayakan kelompok tani dalam menerapkan Sistem Pertanian Terpadu (SPT);

Strategi Pelaksanaan SL adalah dilaksanakan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, dimana wilayah kerja tersebut dipilih 5 wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Dengan demikian dalam setiap wilayah kerja BPP terdapat 5 WKPP sebagai pelaksana sekolah lapangan. Fasilitator pelaksanaan sekolah lapangan di WKPP adalah penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah kerja tersebut.

Adapun lama (durasi) pelaksanaan sekolah lapangan selama 1 musim tanam yang disesuaikan dengan musim di lokasi tersebut. BPP dapat memilih musim tanam periode april–september atau oktober–maret, pilihan ini diterapkan dengan mempertimbangkan jenis komoditi dan musim pada lokasi.

Jumlah peserta sekolah lapangan disetiap WKPP sebanyak 15 orang yang berasal dari 6 kelompok tani di dalam WKPP, dengan rincian 1 kelompok utama (5 orang) berasal dari lokasi pelaksanaan dan 5 kelompok pendamping (masing-masing diwakili 2 orang).

Metode pembelajaran dalam pelaksanaan sekolah lapangan menggunakan prinsip-prinsip belajar sambil berbuat (*learning by doing*) sehingga peserta memahami cara pengambilan keputusan dalam mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi.

Adapun tahapan pelaksanaan sekolah lapangan, sebagai berikut :

a). Rembug Tani Desa, b). Pertemuan Sekolah Lapangan, c). Bahan Pembelajaran dengan materi terkait penerapan Sistem Pertanian Terpadu, d). Bantuan Transport Penyuluh Pertanian, e). Penyampaian laporan ke siluhtan.net dan bentuk lainnya setelah divalidasi Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada lokasi yang telah disinergikan dengan kegiatan dinas teknis di 34 Provinsi.

3. Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita merupakan tindaklanjut dari hasil kegiatan penelitian teknologi yang bersumber dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan diujicobakan pada kawasan tertentu oleh Balai Penyuluhan Pertanian. Penelitian dan penyuluhan pertanian merupakan komponen yang berperan penting dalam mewujudkan peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam mendukung swasembada dan swasembada berkelanjutan menuju kedaulatan pangan. Penelitian bertanggung jawab untuk menghasilkan dan meningkatkan kualitas teknologi dalam rangka menghasilkan komoditas pertanian yang berdaya saing.

Tujuan Adaptasi Teknologi Spesifik Lokasi adalah : Mempercepat penyebaran teknologi spesifik lokalita yang telah direkomendasikan sesuai agro ekosistem; *dan* Meyakinkan kesesuaian paket teknologi usahatani dengan kebutuhan dan kemampuan serta kondisi agroekosistem;

Strategi pelaksanaan adaptasi teknologi spesifik lokalita dilaksanakan di salah satu desa wilayah kabupaten, dimana setiap kabupaten melakukan adaptasi teknologi di 5 wilayah kerja BPP. Adapun penanggungjawab pelaksanaan kegiatan ini adalah lembaga penyuluhan tingkat provinsi. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut : a). Lembaga penyuluhan tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan BPTP untuk melakukan penelaahan terhadap teknologi padi, jagung dan kedelai yang telah di rekomendasikan hasil kaji terap (technology assement). Berdasarkan hal tersebut ditetapkan jenis teknologi yang akan di adaptasikan pada lokasi dengan tipikal ekosistem tertentu; b). Lembaga penyuluhan tingkat provinsi melakukan persiapan lokasi adaptasi di wilayah kabupaten dan wilayah kerja BPP;

c). Pelaksanaan adaptasi teknologi spesifik lokalita difasilitasi oleh penyuluh dan peneliti BPTP dalam 1 (satu) musim tanam; d). Jumlah peserta pelaksanaan adaptasi teknologi spesifik lokalita sebanyak 20 orang yang berasal dari 5 (lima) kelompok tani (poktan) di Wilayah Kerja BPP (WKBPP), dengan rincian 1 (satu) poktan sebagai pelaksana utama dan 4 (empat) poktan pendamping. Masing-masing poktan diwakili oleh 4 (empat) orang petani; e). Dalam proses pelaksanaan kegiatan terdiri dari: (a) rebug tani, (b) pengamatan dan pertemuan dan (c) Farmer Field Day (FFD).

Pelaksanaan sekolah lapangan dilaksanakan di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, dimana wilayah kerja tersebut dipilih 5 wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP). Dengan demikian dalam setiap wilayah kerja BPP terdapat 5 WKPP sebagai pelaksana sekolah lapangan. Fasilitator pelaksanaan sekolah lapangan di WKPP adalah penyuluh pertanian yang bertugas di wilayah kerja tersebut.

Adapun lama (durasi) pelaksanaan sekolah lapangan selama 1 musim tanam yang disesuaikan dengan musim di lokasi tersebut. BPP dapat memilih musim tanam periode april–september atau oktober–maret, pilihan ini diterapkan dengan mempertimbangkan jenis komoditi dan musim pada lokasi.

Jumlah peserta sekolah lapangan disetiap WKPP sebanyak 15 orang yang berasal dari 6 kelompok tani di dalam WKPP, dengan rincian 1 kelompok utama (5 orang) berasal dari lokasi pelaksanaan dan 5 kelompok pendamping (masing-masing diwakili 2 orang).

Metode pembelajaran dalam pelaksanaan sekolah lapangan menggunakan prinsip-prinsip belajar sambil berbuat (*learning by doing*) sehingga peserta memahami cara pengambilan keputusan dalam mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi.

Adapun tahapan pelaksanaan sekolah lapangan, yaitu :a). Rebug Tani Desa; b).Pertemuan Sekolah Lapangan; c). Bahan pembelajaran dengan materi terkait penerapan Sistem Pertanian Terpadu; d). Bantuan Transport Penyuluh Pertanian; e). Penyampaian laporan ke siluhtan.net dan bentuk lainnya setelah divalidasi Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan pada lokasi yang telah disinergikan dengan kegiatan dinas teknis di 34 Provinsi.

- b. Rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional.

Keberhasilan capaian rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional didukung oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Pemberian dukungan Biaya Operasional Penyuluh Pertanian PNS dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pertanian;
2. Pemberian Honorarium bagi THL-TBPP untuk memenuhi kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian.

- c. Rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional.

Beberapa hal yang menyebabkan kurang berhasilnya capaian rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional yaitu realisasi 80,04% dari target 90%, adalah :

1. Proses pengurusan badan hukum membutuhkan waktu yang lama;
2. Biaya administrasi pengurusan badan hukum (besarnya berbeda tergantung daerahnya);
3. Sulitnya memperoleh modal dari pihak ketiga;
4. Masih kurangnya pemahaman terhadap kelembagaan ekonomi petani;

5. Pola pembinaan dan pendampingan yang berbeda setiap penyuluh meskipun sudah ada pedoman dan petunjuk teknis kelembagaan ekonomi petani.

Alternatif Solusi

1. Memfasilitasi keinginan kelompok tani untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi petani;
 2. Memberikan dukungan anggaran dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani.
- d. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP (Skala Likert).

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup BPPSDMP dilaksanakan di 19 (sembilan belas) UPT dengan responden : peserta pelatihan, peserta magang, mahasiswa, siswa, alumni dan orang tua siswa. Hasil pengukuran IKM Badan PPSDMP didapat nilai rata-rata 3,36 dengan nilai IKM 84,11 dengan kriteria mutu layanan BAIK. Pengukuran IKM meliputi 9 (sembilan) unsur pelayanan yaitu : Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya atau Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Publik; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;*dan* Prasarana dan Sarana.

- e. Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan.

Rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan tidak mencapai target dikarenakan :

1. Pada saat ini alumni masih dalam proses mencari kerja karena masih menunggu berkas persyaratan untuk bekerja. Waktu alumni mencari kerja setelah wisuda dan mendapatkan berkas-berkas untuk persyaratan mencari kerja rata-rata antara 4-6 bulan dan pada saat ini mereka masih dalam proses mencari kerja;
2. Lulusan yang sudah bekerja setelah mereka wisuda, sebagian mengambil kesempatan kerja dibidang non pertanian tanpa memperhatikan kesesuaian latar belakang pendidikan mereka, karena hanya ini peluang yang ada;
3. Peluang bekerja dibidang non pertanian lebih besar dari pada bidang pertanian;
4. Kesempatan kerja dibidang non pertanian yang mereka ambil karena mempertimbangkan dekat dengan tempat tinggal atau dekat keluarga daripada menganggur.

Alternatif Solusi

Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan adalah dengan melakukan koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan, pelaksana kegiatan dan SDM yang kompeten serta dukungan dana yang cukup bagi terlaksananya kegiatan.



Gambar 30. Badan PPSDMP berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan dukungan prasarana dan sarana pendidikan dan pembelajaran pendidikan vokasi pertanian di Polbangtan Gowa dan Malang, tahun 2018.

b. Penurunan rata-rata *competency gap index* (CGI) peserta pelatihan.

Keberhasilan capaian kinerja Penurunan rata-rata *competency gap index* (CGI) peserta pelatihan disebabkan oleh :

1. Peran aktif dalam pengembangan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan berbasis *Online* oleh UPT Pelatihan Pertanian yaitu PPMKP Ciawi, BBPP Ketindan, BBPP Batu);
2. Optimalisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM Pertanian baik aparatur, pelaku utama dan pelaku usaha mendukung program strategis Kementerian Pertanian melalui kegiatan pelatihan.
3. Ketertiban dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan serta peran aktif dalam pengembangan Pola Pelatihan Keliling Bagi Penyuluh Pertanian di BPP (BPP Jambi) dan *on Site Training Model* (OTM) di BBPP Lembang;
4. Pengembangan Jejaring kerjasama Pengembangan Sapi *Belgian Blue* di UPT Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Balai *Embrio Trasfer* Cipelang Bogor;
5. Kerjasama BBPKH Cinagara dengan Ditjen PKH dan FAO dibidang ilmu kedokteran Hewan kesehatan global (*One Health Approach*);

6. Ketertiban dalam mengembangkan jenis diklat manajemen dan kepemimpinan bagi aparatur dan non aparatur berbasis kebutuhan masyarakat melalui AKD dan IKD;
 7. Optimalisasi dalam memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi diklat untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan diklat;
 8. Koordinasi penyusunan target outcome penyelenggaraan diklat yang ditetapkan dalam Tujuan Instruksional Khusus Diklat diikuti dengan pemantauan, pelaksanaan, dan evaluasi capaian target;
 9. Koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kurikulum, modul, dan bahan ajar yang *up to date* dan tepat waktu;
 10. Menetapkan sasaran peserta diklat dalam upaya mendukung peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai bagi aparatur dan non aparatur;
 11. Menyelenggarakan diklat berbasis pelayanan prima dan peningkatan kompetensi peserta;
 12. Menerapkan IT dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
 13. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat yang responsif dan berkesinambungan;
 14. Melaksanakan evaluasi pasca diklat dan bimbingan lanjutan untuk menjamin pencapaian target outcome dan menjaga kualitas penyelenggaraan diklat;
 15. Memanfaatkan database peserta diklat untuk pendaftaran online, penerimaan peserta, administrasi diklat, evaluasi pasca diklat, bimbingan lanjutan, dan untuk keperluan evaluasi lainnya;
 16. Meningkatkan kualitas diklat khususnya diklat yang sudah terakreditasi melalui kegiatan *check and review* secara rutin;
- g. Nilai AKIP Badan PPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Tahun 2018 Nilai SAKIP Badan PPSDMP berada di urutan ke 5 (lima) dengan nilai 83,29 (Predikat A Memuaskan) dari 11 (sebelas) eselon I di lingkup Kementan. Daftar nilai SAKIP lingkup kementan pada tabel 16.

Tabel 16
 Nilai dan Predikat SAKIP Lingkup Kementerian Pertanian
 tahun 2018

No	Eselon I Lingkup Kementan	Nilai	Predikat
1	Barantan	90,73	AA (Sangat Memuaskan)
2	BKP	89,4	A (Memuaskan)
3	Itjen	84,63	A (Memuaskan)
4	Ditjen PSP	84,01	A (Memuaskan)
5	BPPSDMP	83,29	A (Memuaskan)
6	Ditjen Bun	82,96	A (Memuaskan)
7	Dit.Hortikultura	82,85	A (Memuaskan)
8	Balitbang	82,29	A (Memuaskan)
9	Setjen	82,21	A (Memuaskan)
10	Ditjen PKH	81,95	A (Memuaskan)
11	Ditjen TP	80,43	A (Memuaskan)

Sumber. Inspektorat Jenderal, 2018

Hasil reuiu Inspektorat Jenderal dalam SAKIP Badan PPSDMP tahun 2018 pada masing-masing komponen penilaian sebagai berikut :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja. Nilai 27,06 dari Bobot 30.
 - Dokumen renstra BPPSDMP Kementerian Pertanian 2015 sd 2019 belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Hal ini terlihat belum selarasnya target kinerja dalam Renstra, RKT maupun PK. Hal ini disebabkan adanya perubahan output kegiatan dalam RKT namun renstranya tidak dilakukan revisi.
 - Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan. Hal ini terlihat dari hasil monitoring rencana aksi belum dilengkapi dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pejabat eselonering yang kompeten.

2. Evaluasi pengukuran kinerja. Nilai 20,83 dari Bobot 25

Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

3. Evaluasi pelaporan kinerja. Nilai 12,28 dari Bobot 15

- Target dan realisasi capaian kinerja antara LAKIN BPPSDMP tidak sinkron dengan capaian kinerja UPT Pelatihan
- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan
- Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja

4. Evaluasi Internal. Nilai 7,29 dari Bobot 10

- Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode karena tidak terdapat dokumen pembahasan dan tindak lanjut rekomendasi dari hasil evaluasi rencana aksi
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata, hal ini terlihat dari rencana aksi yang ditetapkan belum dilengkapi dengan rekomendasi yang konstruktif

5. Evaluasi Capaian Kinerja. Nilai 15,83 dari Bobot 20

- Pencapaian sasaran/kinerja *output* BBPPSDMP terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 99,74%.
- Pencapaian sasaran/kinerja *outcome* BPPSDMP yaitu dari enam Indikator Kinerja, lima indikator kinerja dengan nilai antara 96,68%–100%, dan hanya satu indikator kinerja *outcome* yang capaian kinerjanya di atas 100% yaitu indikator meningkatnya kemandirian kelembagaan petani sebesar 102,16%.

Alternatif Solusi

1. Meningkatkan komponen Perencanaan Kinerja : a). Dokumen renstra BPPSDMP Kementerian Pertanian 2015 sd 2019 sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Menyelaraskan target kinerja dalam Renstra, RKT maupun PK; b).Memanfaatkan Rencana Aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan. Hasil monitoring rencana aksi dilengkapi dengan rekomendasi yang ditujukan kepada pejabat eselonering yang kompeten
2. Meningkatkan komponen pengukuran kinerja yaitu dengan Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
3. Meningkatkan komponen pelaporan kinerja; a). Sinkronisasi target dan realisasi capaian kinerja antara LAKIN BPPSDMP dengan capaian kinerja UPT Pelatihan; b). Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan; c). Informasi yang disajikan digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja
4. Meningkatkan komponen Internal; a).Pemantauan Rencana Aksi untuk memberikan alternatif perbaikan pelaksanaan; b). Hasil evaluasi Rencana Aksi terdapat dokumen pembahasan dan tindaklanjut rekomendasi; c). Hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dan dilengkapi dengan rekomendasi yang konstruktif

5. Meningkatkan komponen Capaian Kinerja : a). Pencapaian sasaran/kinerja *output* BBPPSDMP terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2017 rata rata capaian kinerja sebesar 99,74% agar dapat ditingkatkan; b). Meningkatkan Pencapaian sasaran/kinerja *outcome* BPPSDMP untuk seluruh indikator agar mencapai target yang telah ditetapkan
- h. Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017)
Tercapainya Nilai kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) disebabkan Efisiensi perhitungan dan program-program Sekretariat Badan tahun 2018 telah tercapai dan memenuhi target.
Kendala umum Satker lingkup Badan PPSDMP adalah petugas admin aplikasi SMART masih ada yang kurang tertib dalam mengisi dan mengupdate data sehingga menyebabkan data tidak akurat dan kurang tepat waktu.

Alternatif Solusi

Melakukan workshop rutin terkait petugas admin aplikasi SMART serta Pengawasan dan pembinaan petugas admin aplikasi SMART.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berdasarkan aplikasi SMART PMK 214 yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2018, total penyerapan anggaran mencapai 92,97%, rata-rata konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 77,33%, efisiensi sebesar 7,23%, capaian keluaran program sebesar 100,21%, capaian sasaran program sebesar

99,73%, dan rata-rata Nilai Kinerja Satker 78,89%. Berdasarkan pencapaian tersebut menghasilkan Pencapaian Kinerja lingkup BPPSDMP Tahun 2018 sebesar 87,00, termasuk dalam kategori Baik dan Efisien.

Capaian realisasi anggaran Badan PPSDMP pada tahun 2018 sebesar Rp.1.175.659.720.328 (92,97%) dari pagu anggaran sebesar Rp.1.264.588.172.000. Jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 tahun 2017 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 214/2017), capaian kinerja pelaksanaan anggaran Badan PPSDMP tahun 2018 pada gambar 31.



Gambar 31. Capaian Kinerja Anggaran Badan PPSDMP, TA 2018 berdasarkan Aplikasi Monev Kinerja Anggaran PMK 214/2017

Berdasarkan gambar 24, pencapaian nilai kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2018 termasuk kedalam kategori **BAIK**. Persentase capaian kinerja anggaran

sebesar **87,00** Badan PPSDMP tahun 2018 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214/2017 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase capaian keluaran program adalah 100,21%;
2. Persentase penyerapan anggaran adalah 92,97%;
3. Persentase konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan adalah 77,33%;
4. Persentase efisiensi adalah 7,23%;
5. Persentase capaian sasaran program adalah **99,73%**;
6. Persentase rata-rata nilai satker adalah **78,8%**;

Selanjutnya untuk analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK 214/2017 maka dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan sebagaimana berikut :

Rumus :

$$\mathbf{NE = 50\% + (E/20 \times 50)}$$

Keterangan : NE = Nilai Efisiensi
 E = Efisiensi

* Catatan :

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh *range* nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%.

Persentase capaian kinerja Badan PPSDMP tahun 2018 dalam hal efisiensi adalah mencapai 7,23, maka penghitungan koefisien nilai efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned} \text{NE} &= 50\% + (7,23/20 \times 50) \\ &= 0,5 + (0,0723/20 \times 50) \\ &= 0,5 + 0,18075 \\ &= \mathbf{0,68075 \text{ atau } 68,08\%} \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran Badan PPSDMP pada tahun 2018 adalah **68,08%**.

Jika berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator pada Perjanjian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2018, yang mencapai **target fisik** sebanyak 6 (enam) indikator dari 8 (delapan) indikator yang telah diperjanjikan. Perbandingan dan perkembangan capaian kinerja dari PK Badan PPSDMP tahun 2018 dengan PK Badan PPSDMP tahun 2017 sebagai berikut :

1. Indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang menerapkan sistem pertanian terpadu terhadap total kelembagaan petani nasional di tahun 2018 **sudah** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 105,60% (sangat berhasil), sedangkan ditahun 2017 belum menjadi target PK;
2. Indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya terhadap total kelembagaan petani nasional di tahun 2018 **sudah** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 100% (berhasil), turun sebesar 2,16% dibandingkan capaian kinerja tahun 2017 yaitu 102,16%;
3. Indikator kinerja rasio kelembagaan petani yang menjadi kelembagaan ekonomi petani (KEP) terhadap total kelembagaan petani nasional di tahun 2018 **kurang** memenuhi target PK, persentase capaian

kinerjanya adalah 97,83% (berhasil), sedangkan tahun 2017 belum menjadi target PK;

4. Indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat atas layanan publik BPPSDMP di tahun 2018 **sudah** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 101.20% (sangat berhasil), sedangkan tahun 2017 belum menjadi target PK;
5. Indikator kinerja rasio lulusan pendidikan pertanian yang bekerja dibidang pertanian terhadap total lulusan pendidikan pertanian pada tahun berjalan di tahun 2018 **kurang** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 88.93% (berhasil), sedangkan tahun 2017 belum menjadi target PK;
6. Indikator kinerja penurunan rata-rata competency gap index (CGI) peserta pelatihan di tahun 2018 **sudah** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 108.91% (sangat berhasil), sedangkan tahun 2017 belum menjadi target PK;
7. Indikator kinerja nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di tahun 2018 **sudah** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 101,57% (sangat berhasil), sedangkan tahun 2017 belum menjadi target PK. Realisasi Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2017 adalah 77,41.
8. Indikator kinerja Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) di tahun 2018 **sudah** memenuhi target PK, persentase capaian kinerjanya adalah 100,87% (sangat berhasil), sedangkan tahun 2017

belum menjadi target PK. Realisasi Nilai Kinerja (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) tahun 2017 adalah 87,65.

B. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018.

Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2018 adalah Rp. 1.175.659.720.328 dari PAGU sebesar Rp. 1.264.588.172.000. Persentase capaian target PAGU adalah **92,97%**. Realisasi anggaran Badan PPSDMP tahun 2018 bila dirinci yaitu Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian sebesar Rp. 221.664.366.588, Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 474.390.659.160, Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan PPSDMP adalah Rp. 93.852.952.686 dan Pendidikan Pertanian sebesar Rp. 385.751.741.894. Rincian realisasi capaian target pagu pada tabel 17.

Tabel 17
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2018

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)		
		PAGU	REALISASI	%
1	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	232.788.809.000	221.664.366.588	95,22
2	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	485.249.332.000	474.390.659.160	97,76
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	140.048.801.000	93.852.952.686	67,01
4	Pendidikan Pertanian	406.501.230.000	385.751.741.894	94,90
	TOTAL	1.264.588.172.000	1.175.659.720.328	92,97

Sumber data. Sekretariat Badan, tahun 2018

Tabel 17 menunjukkan bahwa persentase capaian target pagu anggaran Badan PPSDMP **tertinggi** adalah pada Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian yaitu 97,76%, sedangkan **terendah** adalah pada Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan PPSDMP yaitu 67,01%.